

Received : 9 February 2025  
Revised : 21 March 2025  
Accepted : 24 March 2025  
Online : 25 March 2025  
Published : 30 April 2025

## **Pembuatan Foto Udara untuk Mendukung Digitalisasi Nagari Sikucua Barat Kabupaten Padang Pariaman**

Eri Stiyanto<sup>1</sup>, Muhammad Fajrul Falah<sup>2\*</sup>, Tiara Mahardika<sup>2</sup>, Afrizal Putra Prices<sup>3</sup>, Asri Yuda Trinanda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa (D4), Politeknik Negeri Padang  
Jalan Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Teknologi Sipil (D3), Politeknik Negeri Padang

Jalan Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Perencanaan Jalan dan Jembatan, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Jalan Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[eristiyanto@pnp.ac.id](mailto:eristiyanto@pnp.ac.id), <sup>2</sup>[mfajrulfalah@pnp.ac.id](mailto:mfajrulfalah@pnp.ac.id), <sup>2</sup>[tiara@pnp.ac.id](mailto:tiara@pnp.ac.id),  
<sup>3</sup>[afrizalpp@pnp.ac.id](mailto:afrizalpp@pnp.ac.id), <sup>3</sup>[asriyuda@pnp.ac.id](mailto:asriyuda@pnp.ac.id)

\*Penulis korespondensi

### **Abstract**

*Legal certainty over nagari administrative areas is a crucial element in the nagari governance system. A base map in the form of imagery is needed to streamline the process of confirming and determining boundaries between bordering nagari. Drone technology is an effective solution in taking aerial photographs that can be used as a base image for drawing administrative boundaries. Nagari Sikucua Barat, located in Padang Pariaman Regency, currently does not have a clear legal basis for its administrative boundaries. This service activity aims to provide accurate and up-to-date base imagery to support the drawing of administrative boundaries legally and technically. In addition, this activity also increases the capacity of the village government in utilizing geospatial technology in order to systematically manage regional information. The result of this activity is the availability of the latest aerial imagery up to December 2024, replacing the previous High Resolution Upright Imagery (CTRT) which only includes data up to 2018. The impact of this activity includes increasing the efficiency of nagari administration, integrating assets and resources into a spatial data-based information system, and strengthening the legal basis of territorial boundaries. The service assistance will continue until the nagari has an interactive, integrated, and user-friendly information system to support data-based decision-making more accurately and transparently.*

**Keywords:** *Aerial photographs; Administrative Area; Geospatial Information; Smart Village*

### **Abstrak**

Kepastian hukum terhadap wilayah administrasi nagari merupakan elemen krusial dalam sistem pemerintahan nagari. Peta dasar berupa citra sangat diperlukan untuk mengefisiensi proses penegasan dan penetapan batas antar nagari sempadan. Teknologi drone menjadi solusi efektif dalam pengambilan foto udara yang dapat digunakan sebagai citra dasar untuk penarikan garis batas wilayah administrasi. Nagari Sikucua Barat, yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang jelas terkait batas wilayah administrasinya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyediakan citra dasar yang akurat dan mutakhir guna mendukung penarikan garis batas wilayah administrasi secara legal dan teknis. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas pemerintah nagari dalam pemanfaatan

teknologi geospasial agar dapat mengelola informasi wilayah secara sistematis. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya citra udara terbaru hingga Desember 2024, menggantikan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) sebelumnya yang hanya mencakup data hingga tahun 2018. Dampak kegiatan ini meliputi peningkatan efisiensi administrasi nagari, integrasi aset dan sumber daya ke dalam sistem informasi berbasis data spasial, serta penguatan dasar hukum batas wilayah. Pendampingan pengabdian akan berlanjut hingga nagari memiliki sistem informasi yang interaktif, terintegrasi, dan ramah pengguna guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat dan transparan.

**Kata Kunci:** Foto Udara; Batas Administrasi; Informasi Geospasial; Nagari Digital

## 1. PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Desa, 2014) Desa harus terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak di dalam hukum, (2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara administratif dengan wilayah lain dan (3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Fajriyanto et al., 2023). Batas wilayah merupakan garis khayal yang menggambarkan batas antar wilayah kelurahan/desa/sebutan lainnya, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara (Amrillah et al., 2020; PerMendagri, 2016).

Kemajuan teknologi informasi dan geospasial telah membuka peluang besar untuk mendukung pembangunan nagari yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan nagari adalah kepastian

hukum akan wilayah administrasi (Suardita & Adrie, 2023). Keberadaan batas wilayah yang jelas tidak hanya penting untuk menghindari konflik antar-nagari tetapi juga menjadi dasar perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pemberian layanan publik yang adil (Yanti et al., 2022). Citra atau foto udara merupakan instrumen penting dalam proses pemetaan batas wilayah. Dengan resolusi tinggi dan akurasi spasial yang mumpuni, foto udara mampu memberikan gambaran visual terkini tentang kondisi geografis, pemanfaatan dan penggunaan lahan di suatu wilayah. Data ini dapat digunakan untuk memastikan dan memperbarui informasi spasial termasuk peta batas administrasi nagari, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data (Afrizal et al., 2022; Dewi et al., 2023)

Digitalisasi nagari merupakan langkah strategis untuk membawa tata kelola pemerintahan ke era modern (Aisyah & Suriyani, 2024; Jani Rahayu et al., 2024; Mulyani et al., 2022). Dengan mengintegrasikan data batas wilayah hasil kartometrik dan atau pengukuran langsung yang telah disepakati antar sempadan ke dalam sistem informasi terintegrasi sehingga pemerintah desa dapat mengelola aset, merencanakan pembangunan, dan memberikan

pelayanan publik secara lebih efisien. Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui akses data yang transparan dan mudah diakses. Kombinasi antara foto udara, kepastian hukum wilayah administrasi dan digitalisasi desa dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan ketiga elemen ini menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Nagari Sikucua Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, namun terealisasi pada 2016 dan pelantikan PJ Wali Nagari dilaksanakan bulan Oktober 2016, bersama dengan ke-34 nagari yang dimekarkan (Putri, 2024). Berdasarkan perda tersebut Nagari Sikucua Barat berbatasan dengan: Kabupaten Agam (Utara), Nagari Sikucur (Timur), Pemerintahan Nagari Persiapan Sikucur Utara (Selatan) dan Nagari Kuranji Hulu (Barat).

Nagari Sikucua Barat berkedudukan di Korong Alahan Tabek, dan untuk kewenangan dan hal lain selanjutnya sesuai pasal 8 ayat (3) dan Ketentuan Penutup Pasal 14, akan diatur dengan Peraturan Bupati. Nagari Sikucua Barat memiliki 7 korong diantaranya: Patamuan, Alahan Tabek, Koto Padang, Koto Panjang, Aie Sonsang Durian Angik, Toboh Marunggai, dan Toboh.

Pemerintah di nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dengan perangkatnya. Luas wilayah berdasarkan Perda pembentukan nagari adalah 8,1 km<sup>2</sup>. Dengan tutupan lahan didominasi oleh kebun campuran dengan pemanfaatan paling banyak adalah kelapa. Penduduk yang ada di nagari total berjumlah 2.581 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 182, aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya adalah pertanian.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Peta dasar dan batas administrasi desa merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Dengan adanya peta yang akurat, pemerintah desa dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayahnya. Di era digital, digitalisasi desa telah menjadi kebutuhan untuk mendukung pengelolaan data secara efisien dan meningkatkan layanan publik. Studi ini bertujuan untuk merangkum literatur terkait peta dasar, batas administrasi desa, dan digitalisasi desa (Prakasa, 2017).

Peta dasar merupakan representasi grafis dari unsur-unsur geografi yang mencakup topografi, batas wilayah, dan penggunaan lahan. Penggunaan peta dasar penting untuk mendukung berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi bencana. Dalam konteks desa, peta dasar menjadi fondasi bagi perencanaan tata ruang dan administrasi wilayah (Fauzi Mustofa, 2021; Mustofa & Wahyuni, 2021).

Batas administrasi desa menentukan wilayah yurisdiksi suatu desa yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Konflik batas wilayah sering terjadi akibat kurangnya data yang akurat dan *up-to-date*. Oleh karena itu, metode modern seperti survei kartometrik dan teknologi GIS sangat diperlukan (Sutriyono et al., 2017).

Digitalisasi desa melibatkan penerapan teknologi informasi untuk mendukung berbagai aspek administrasi dan pelayanan. Dengan digitalisasi, desa dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memperluas akses informasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu implementasi utamanya adalah pembuatan peta digital yang mendukung tata kelola yang lebih transparan (Supriyani & Setyowati, 2023).

Integrasi antara peta dasar dan digitalisasi desa dapat menghasilkan sistem informasi geografis (SIG) yang membantu dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan keuangan, dan layanan publik. Dengan dukungan teknologi seperti drone dan GPS, desa dapat membuat peta yang lebih akurat dan interaktif (Isa et al., 2023).

### 3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah partisipatif dari stakeholder terkait, khususnya pemerintah Nagari Sikucua Barat, masyarakat dan pihak – pihak terlibat

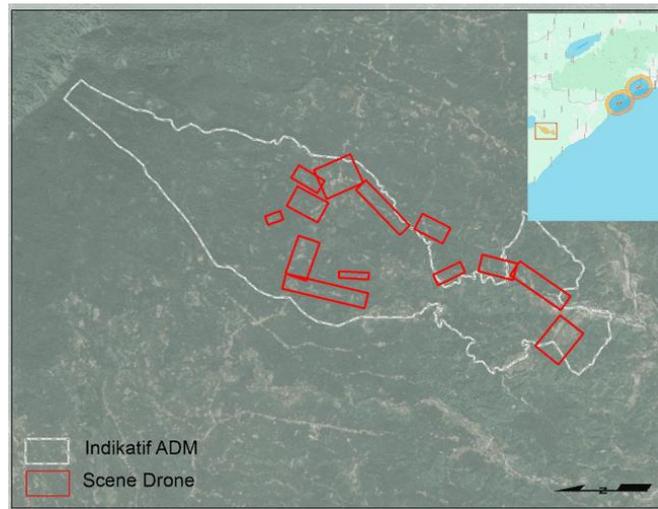
lainnya untuk mengarahkan area vital yang ada di lingkungan wilayah administrasi Nagari Sikucua Barat. Teknis pengambilan gambar dilakukan dengan drone dengan tinggi dan jangkauan yang ditoleransi aturan yang berlaku. Lokasi pengambilan gambar yang jauh dari bandara memiliki keuntungan tersendiri, karena bisa melakukan manuver sesuai kebutuhan. Drone yang digunakan ada dua jenis yaitu: DJI Phantom 4 Pro dan Mini 4 Pro Combo (Gambar 1).

*Update* drone dilakukan terhadap 15 s/d 20 *scene* pada lokasi pemukiman dan lokasi vital dengan sebaran seperti yang tertera pada Gambar 2. Setelah pengambilan terhadap semua *scene* lokasi dilanjutkan pengolahan hasil foto drone untuk di orthophoto dan mozaik menggunakan aplikasi Agisoft Metashape Profesional V.2.0.1. Proses selanjutnya melakukan koreksi geometri dan overlay dengan citra lainnya agar seluruh wilayah AOI terpetakan. Teknik penyajian dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS Desktop 10.7.1 dengan frame kertas A0 dan A1 dengan spekteknis penyajian sesuai aturan yang berlaku.

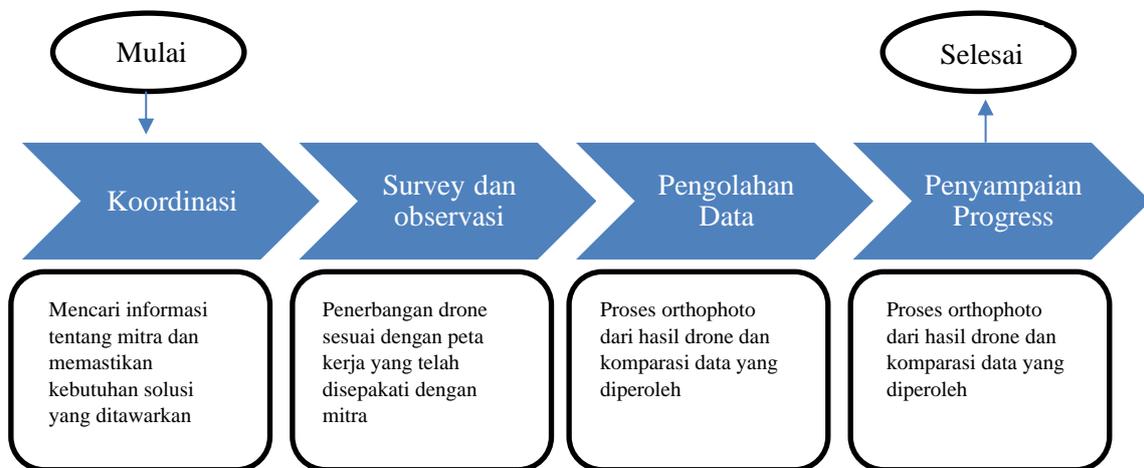
Secara umum pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan 4 tahapan diantaranya: (1) Koordinasi; (2) Survei dan Observasi; (3) Pengolahan Data; (4) Penyampaian hasil; dan (5) penyelesaian berkas administrasi untuk detailnya seperti pada Gambar 3.



**Gambar 1.** DJI Phantom 4 Pro dan Mini 4 Pro Combo



**Gambar 2.** Peta Kerja lokasi *Update Drone*



**Gambar 3.** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pembuatan Foto Udara untuk Mendukung Digitalisasi Nagari Sikucua Barat Kabupaten Padang Pariaman

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada 22 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 di Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan dimulai dengan koordinasi dengan pihak nagari yang terdiri atas PJ Wali Nagari Sikucua Barat beserta staff dan perwakilan dari Masyarakat seperti yang terlihat pada Gambar 4.

Pemerintah Nagari Sikucua Barat berkeinginan mampu mengikuti tuntutan kebutuhan layanan yang serba digital, serta kepastian hukum akan wilayah

administrasi. Namun saat ini belum adanya peta batas nagari yang disepakati dan untuk mendukung penarikan garis batas sangat dibutuhkan foto udara dan/atau citra satelit. Oleh karena itu, proses pengambilan foto udara dengan drone dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dalam proses penarikan garis batas dan kebutuhan jangka panjang sebagai dasar sebaran informasi pendukung untuk digitalisasi nagari. Proses pengambilan gambar dengan drone dapat dilihat pada Gambar 5.



**Gambar 4.** Koordinasi dengan pihak Nagari dan Masyarakat Sikucua Barat



**Gambar 5.** Proses Pengambilan Foto Udara Nagari Sikucua Barat

Foto udara menjadi rujukan dalam Peta Dasar untuk dalam penentuan garis batas berdasarkan kaedah kartometrik.

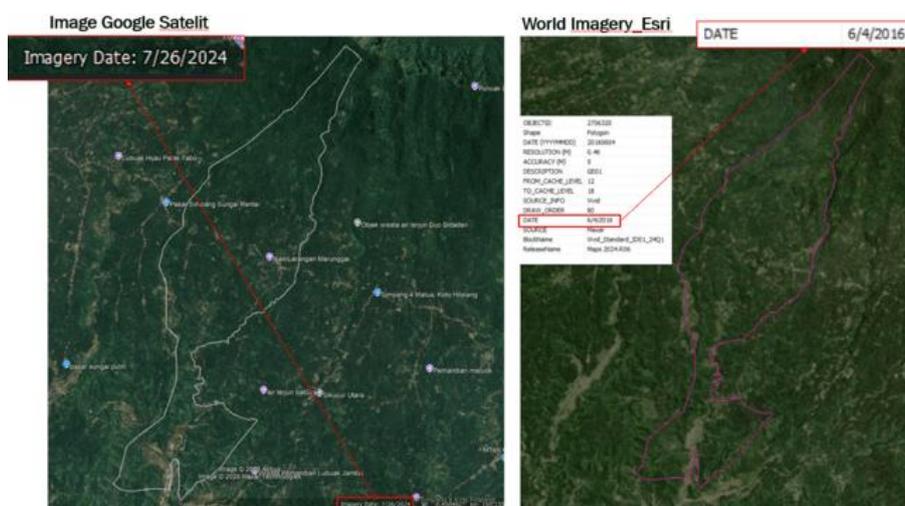
Selain foto udara sesuai dengan Permendagri 45 tahun 2016, peta dasar juga boleh dari peta Rupa Bumi Indonesia

(RBI) dengan skala 1:5000, atau Citra dengan Rosolusi kurang dari 4 meter (Citra < 4m). Ketersediaan data RBI untuk wilayah nagari sikucur bahkan umumnya di Provinsi Sumatera Barat belum tersedia untuk skala 1:5000, berdasarkan telah yang dilakukan dari website Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk Nagari Sikucua Barat bisa menggunakan citra dengan update gambar terupdate tahun 2016. Hal tersebut cukup mempersulit mengenali objek yang menjadi acuan batas jika dikondisikan untuk tahun 2024.

Selain data citra yang didapat dari BIG untuk wilayah nagari, berdasarkan liputan Google Imagery dengan liputan 26 Juli 2024, ini bisa digunakan namun legalitas penggunaan data untuk keperluan penetapan batas bisa dipertanyakan ketika proses berlanjut pada asistensi data teknis ke pihak yang berwenang (BIG). Liputan Google Imagery tersebut dapat dilihat pada

Gambar 6. Hasil foto udara yang dilakukan tim pengabdian Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang menjadi kunci utama dan membantu dalam penyediaan peta dasar untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Nagari Sikucua Barat. Hasil peta citra (Foto Udara) Nagari Sikucua Barat dapat dilihat pada Gambar 7.

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian ini diwujudkan dalam bentuk peta citra (foto udara) Nagari Sikucua Barat, yang menggambarkan wilayah nagari secara detail dan akurat. Proses penyampaian dan penyerahan hasil kegiatan pengabdian ini dilakukan secara resmi kepada pihak nagari sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan wilayah berbasis data spasial. Dokumentasi momen tersebut dapat dilihat pada Gambar 8, yang menunjukkan keterlibatan aktif antara tim pengabdian dan perwakilan nagari dalam kegiatan tersebut.



**Gambar 6.** Ketersediaan Rujukan Peta Dasar Nagari Sikucua Barat



**Gambar 7.** Hasil Peta Citra (Foto Udara) Nagari Sikucua Barat

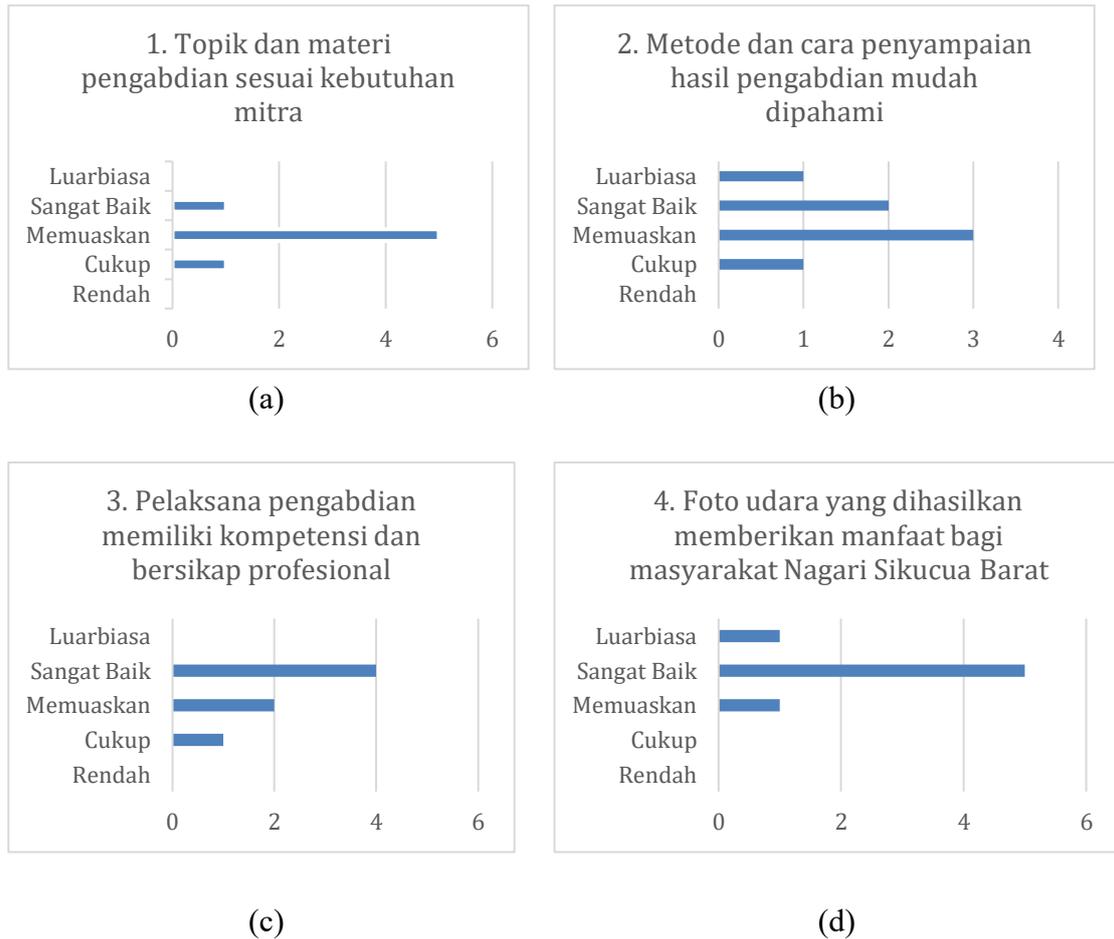


**Gambar 8.** Penyampaian dan Penyerahan Hasil Kegiatan Pengabdian Pembuatan Foto Udara untuk Mendukung Digitalisasi Nagari Sikucua Barat Kabupaten Padang Pariaman

Setelah diserahkan kepada pihak nagari, peta citra ini mendapat respon yang sangat positif yang dapat dilihat pada hasil kuisisioner (Gambar 9). Gambar 9.a menunjukkan bahwa topik dan materi pengabdian cukup diapresiasi oleh mitra (memuaskan), Gambar 9.b. menunjukkan bahwa mitra cukup memahami metode dan cara penyampaian hasil pengabdian, Gambar 9.c menunjukkan bahwa pelaksana pengabdian dinilai memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya, serta Gambar 9.d menunjukkan hasil dari pengabdian memberikan

manfaat yang nyata terhadap masyarakat Nagari Sikucua Barat.

Secara umum, hasil kuisisioner menunjukkan aparat nagari beserta Masyarakat mengapresiasi kontribusi ini sebagai langkah yang mendukung pengembangan wilayah mereka. Dengan peta ini, mereka berharap dapat memaksimalkan potensi nagari serta mengatasi berbagai tantangan yang ada dengan lebih terstruktur dan terarah. Pengabdian ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun wilayah yang lebih baik.



**Gambar 9.** Grafik Hasil Kuisisioner Kegiatan Pengabdian Pembuatan Foto Udara untuk Mendukung Digitalisasi Nagari Sikucua Barat Kabupaten Padang Pariaman

## 5. PENUTUP

Pembuatan foto udara yang telah dilakukan merupakan langkah penting dalam proses penetapan batas wilayah sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya pada tahapan deliniasi secara kartometri terhadap batas-batas objek dengan nagari yang berbatasan. Resolusi tinggi hasil foto drone mampu merepresentasikan objek secara detail dan akurat. Peta ini disusun untuk memberikan gambaran visual yang akurat dan terperinci mengenai wilayah Nagari Sikucua Barat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya,

serta berbagai kebutuhan strategis lainnya.

Pendampingan lebih lanjut diperlukan untuk mendukung terwujudnya nagari berbasis Smart System. Langkah ini diawali dengan memastikan kepastian hukum terkait tata kelola wilayah, memperbarui informasi berdasarkan data spasial, hingga mengintegrasikannya ke dalam sistem yang terpadu. Dengan demikian, nagari dapat berkembang menjadi wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data yang kuat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [UU] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [Permen] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Afrizal, R., Ruspianda, R., & Pratiwi, R. (2022). Pemanfaatan Drone DJI Phantom4pro dan Aplikasi SIG (Arcgis) Untuk Identifikasi Batas Administrasi Wilayah Di Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *J. Perangkat Lunak*, 4(3), 172–181.
- Aisyah, S., & Suriyani, E. (2024). Implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDES) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Kapar Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(2), 2073–2088.
- Amrillah, D., Hardiana, E., Artanto, E., & Rimayanti, A. (2020). Dinamika Pemetaan Batas Desa/Kelurahan secara Kartometrik tanpa Kesepakatan di Provinsi Aceh. *Seminar Nasional Geomatika: Informasi Geospasial Untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Dewi, C., Murdapa, F., Fadly, R., & Anisa, R. (2023). Bantuan Teknis Pemetaan Dusun Sindang Sari Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan Menggunakan Foto Udara. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Inovatif*, 2(3), 95–102.
- Fajriyanto, Tridawati, A., Novianti, T. C., & Suyadi. (2023). Proses Penetapan dan Penegasan Batas Dusun 1 Induk, Desa Natar, Lampung Selatan melalui Bimbingan Teknis Berbasis Parsipatory Mapping. *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 1–8.
- Fauzi Mustofa, M. (2021). *Pemanfaatan Web-GIS untuk Pemetaan Jangkauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Permukiman di Kecamatan Tanon*. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- Isa, M., Sapta Wirandha, F., Sugiyanto, D., & Yusibani, E. (2023). Perancangan Sistem Informasi Geografis Online dalam Penguatan Potensi Gampong. *Jurnal ABDIMAS BINA BANGSA*, 4(2), 1160–1170.
- Jani Rahayu, M., Retining Rahayu, A., & Suryo Fitrianto, D. (2024). Digitalisasi Data Spasial Desa melalui Aplikasi ArcGis sebagai bentuk Adaptasi Perkembangan Sistem Informasi dan Kebijakan BIG Data. *J. Akal: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, 2, 199–207.
- Mulyani, N., Hutahaeon, J., Azhar, Z., Kartika, A., & Ambarwati, A. (2022). Coaching Clinic: Digitalisasi Tata Kelola Administrasi dan Pelayanan Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 2527–2536.
- Mustofa, F. C., & Wahyuni, W. (2021). Infrastruktur Data Spasial berbasis Geoportal: Implementasi Kebijakan Satu Peta. *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 61–78.

- Prakasa, S. (2017). *Validasi Data Administrasi Desa Menggunakan Metode Kartometrik*. Institut Teknologi Sepuluh November.
- Suardita, I. K., & Adrie. (2023). Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa. *YUSTITIA*, 17(2), 19–27.
- Supriyani, & Setyowati, Y. (2023). Digitalisasi Desa dalam Perspektif Governmentality. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(1), 11–29.
- Sutriyono, E., Nalendra, S., Dyah Hastuti, E. W., Juliantina, I., Thayib, R., Idarwati, Dwi Mayasari, E., & Umar Fathan, H. (2017). *Peran Open Street Map (OSM) terhadap Administrasi Desa Tekana Kabupaten OKU Selatan*. Seminar Nasional AVoER IX. Palembang
- Yanti, D., Ekaputra, E. G., & Stiyanto, E. (2022). Penetapan Batas Nagari Berdasarkan Aspek Teknis dan Non-Teknis (Studi Kasus: Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 29(2), 130–141.